

## PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI DESA AMPLAS

*Jane Agustin Sianturi<sup>1</sup>, Julianty c.Simbolon<sup>2</sup>, Alza Ayunda,<sup>3</sup> Ester Enjelika Sianturi<sup>4</sup>*

*Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Indonesia*

[janeesianturi@gmail.com](mailto:janeesianturi@gmail.com) [alzaayunda267@gmail.com](mailto:alzaayunda267@gmail.com) [juliantysimbolon@gmail.com](mailto:juliantysimbolon@gmail.com)  
[esianturi132@gmail.com](mailto:esianturi132@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Amplas, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Fokus kajian diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu kebermanfaatan, ketepatan sasaran, dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan program BLT. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah metode campuran (mixed methods), yang menggabungkan analisis kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh hasil yang komprehensif. Data kuantitatif diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 30 responden, sedangkan data kualitatif dikumpulkan lewat wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum masyarakat menilai program BLT telah membantu meringankan kebutuhan ekonomi rumah tangga dan memberikan manfaat nyata, meskipun masih terdapat beberapa kendala seperti ketidaktepatan sasaran dan keterlambatan penyaluran. Berdasarkan uji validitas dan reliabilitas, instrumen penelitian dinyatakan layak, dan analisis data memperlihatkan bahwa persepsi positif masyarakat berhubungan dengan transparansi dan keadilan dalam distribusi bantuan. Penelitian ini menegaskan pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap mekanisme penyaluran BLT agar kebijakan dapat berjalan lebih efektif, adil, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Kata kunci: Persepsi masyarakat; kebijakan publik; bantuan langsung tunai; ketepatan sasaran; kepuasan masyarakat.

### **Abstract**

*This study aims to analyze the community's perception of the policy implementation of Direct Cash Assistance (BLT) in Amplas Village, Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency. The research focuses on three main aspects: usefulness, targeting accuracy, and community satisfaction toward the distribution of BLT. A mixed-method approach was employed, combining quantitative and qualitative analyses to obtain comprehensive results. Quantitative data were collected through questionnaires distributed to 30 respondents, while qualitative data were obtained from interviews and documentation. The findings indicate that, in general, the community perceives the BLT program as beneficial in easing household economic burdens and providing tangible benefits, although issues such as mistargeting and delayed disbursement still occur. Validity and reliability tests show that the research instruments are appropriate, and data analysis reveals that positive public perception correlates with transparency and fairness in the distribution process. This research highlights the need for continuous evaluation of BLT implementation mechanisms to ensure the program operates more effectively, fairly, and strengthens public trust in village governance.*

*Keywords: public perception; public policy; direct cash assistance; targeting accuracy; community satisfaction.*

## **PENDAHULUAN**

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan kebijakan strategis pemerintah yang bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat miskin serta menjaga daya beli di tingkat lokal. Kebijakan ini menjadi salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan sosial, terutama ketika kondisi ekonomi masyarakat sedang tidak stabil. Melalui pemberian bantuan tunai, diharapkan warga yang terdampak dapat mempertahankan kebutuhan dasar dan mendorong perputaran ekonomi di desa. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan BLT kerap menimbulkan beragam persepsi di masyarakat terkait ketepatan sasaran, transparansi, serta keadilan dalam proses penyaluran.

Kenyataannya, beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan adanya perbedaan persepsi penerima terhadap kebijakan tersebut. Sebagian masyarakat menilai BLT telah memberikan manfaat nyata, sementara sebagian lain memandang bahwa proses pendataan dan distribusinya belum sepenuhnya adil. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara tujuan ideal kebijakan dan realitas pelaksanaannya di lapangan. Research gap inilah yang menjadi dasar pentingnya penelitian ini, yaitu melihat bagaimana persepsi masyarakat terbentuk dan apa saja faktor yang memengaruhinya. Unsur kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap persepsi masyarakat Desa Amplas, yang memiliki dinamika sosial dan ekonomi khas sebagai wilayah penyangga Kota Medan.

Penelitian ini penting dilakukan karena keberhasilan kebijakan publik tidak hanya diukur dari aspek administratif dan penyaluran dana, tetapi juga dari tingkat penerimaan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dengan memahami persepsi masyarakat secara mendalam, pemerintah desa dapat melakukan evaluasi kebijakan yang lebih efektif dan berkeadilan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap kebijakan penyaluran BLT di Desa Amplas, yang mencakup aspek kebermanfaatannya, ketepatan sasaran, serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaannya.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran (mixed methods) yang menggabungkan analisis kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai persepsi masyarakat terhadap kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Amplas, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Pendekatan ini dipilih karena isu sosial seperti persepsi publik tidak cukup dijelaskan melalui angka, tetapi juga membutuhkan pemahaman mendalam terhadap pengalaman dan pandangan masyarakat.

Subjek penelitian mencakup warga Desa Amplas yang menjadi penerima maupun nonpenerima BLT. Sampel sebanyak 30 responden ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memahami atau terlibat langsung dalam proses penyaluran bantuan. Data kuantitatif dikumpulkan melalui angket berbasis skala Likert yang mencakup tiga aspek utama: kebermanfaatan, ketepatan sasaran, dan kepuasan terhadap kebijakan BLT. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam dan dokumentasi terhadap beberapa masyarakat dan aparat desa.

Prosedur penelitian dimulai dari tahap persiapan instrumen, pengumpulan data lapangan, pengolahan data, hingga penyusunan laporan hasil penelitian. Analisis kuantitatif dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan bantuan perangkat lunak statistik, mencakup uji validitas, reliabilitas, dan normalitas. Sementara itu, data kualitatif dianalisis dengan model Miles dan Huberman melalui tiga langkah utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil kedua pendekatan tersebut kemudian diintegrasikan menggunakan strategi convergent mixed methods untuk memperoleh interpretasi yang komprehensif dan mendalam mengenai persepsi masyarakat terhadap kebijakan penyaluran BLT di Desa Amplas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Amplas menghasilkan beberapa temuan penting yang diperoleh dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Pengujian instrumen penelitian menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dalam angket dinyatakan valid dan reliabel. Hasil uji validitas memperlihatkan nilai korelasi ( $r$  hitung) lebih besar dari  $r$  tabel (0,361) sehingga setiap butir pertanyaan mampu mengukur variabel penelitian dengan tepat. Nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,784 untuk variabel persepsi masyarakat dan 0,804 untuk variabel kebijakan penyaluran BLT menunjukkan bahwa seluruh instrumen tergolong sangat reliabel. Selain itu, hasil uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov memperoleh nilai signifikansi 0,200 ( $> 0,05$ ), menandakan bahwa data berdistribusi normal dan layak untuk dianalisis lebih lanjut.

Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif menunjukkan bahwa masyarakat Desa Amplas secara umum memiliki persepsi positif terhadap program BLT. Sebagian besar responden menilai bahwa bantuan tunai tersebut telah membantu memenuhi kebutuhan pokok dan mengurangi beban ekonomi keluarga. Namun, masih ditemukan pandangan berbeda mengenai ketepatan sasaran penerima, karena ada warga yang merasa layak menerima tetapi

tidak terdaftar dalam daftar penerima manfaat. Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa aspek transparansi dan keadilan menjadi faktor utama yang memengaruhi penilaian masyarakat. Ketika pendataan dilakukan terbuka dan mekanisme distribusi dijelaskan secara jelas, tingkat kepercayaan terhadap aparat desa meningkat.

Data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara memperkuat hasil temuan kuantitatif. Beberapa masyarakat mengakui bahwa program BLT sangat membantu dalam masa sulit, namun mereka berharap adanya peningkatan dalam proses pendataan dan waktu penyaluran agar lebih tepat dan merata. Dari hasil penggabungan analisis, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan program BLT tidak hanya bergantung pada jumlah bantuan, tetapi juga pada kualitas tata kelola, keterbukaan informasi, dan keadilan dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat desa.

### **Pembahasan Hasil Penelitian**

Pembahasan ini menguraikan hasil temuan yang diperoleh dari analisis data kuantitatif dan kualitatif mengenai persepsi masyarakat terhadap kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Amplas, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat menilai kebijakan BLT membawa manfaat nyata dalam membantu kebutuhan ekonomi rumah tangga. Akan tetapi, dalam praktiknya, masih terdapat persoalan yang menimbulkan perbedaan pandangan di tengah masyarakat, terutama terkait keadilan pendataan dan keterlambatan penyaluran bantuan.

Secara kuantitatif, hasil analisis angket memperlihatkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kebijakan penyaluran BLT cenderung positif. Berikut rekapitulasi skor persepsi masyarakat terhadap tiga aspek utama:

Tabel 1. Rata-rata Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan BLT di Desa Amplas

| <b>Aspek Persepsi</b>  | <b>Rata-Rata skor</b> | <b>Kategori</b> |
|------------------------|-----------------------|-----------------|
| Kebermanfaatan Program | 4,25                  | Sangat Baik     |
| Ketepatan sasaran      | 3,62                  | Cukup Baik      |
| Kepuasan Masyarakat    | 4,05                  | Baik            |
| Rata- Rata Total       | 3,97                  | Baik            |

Hasil di atas menunjukkan bahwa aspek kebermanfaatan memperoleh nilai tertinggi. Sebagian besar responden merasa bantuan tersebut cukup membantu memenuhi kebutuhan harian seperti pangan, listrik, dan biaya sekolah anak. Hal ini sejalan dengan pernyataan

masyarakat dalam wawancara yang mengatakan bahwa bantuan tunai memberikan “napas tambahan” saat kondisi ekonomi sulit. Artinya, dari sisi fungsi sosial ekonomi, program BLT sudah mencapai tujuannya.

Namun, skor terendah muncul pada aspek ketepatan sasaran. Beberapa responden menyampaikan bahwa pendataan penerima masih kurang akurat karena belum sepenuhnya berbasis data lapangan terkini. Ada warga yang dianggap mampu justru mendapat bantuan, sementara warga lain yang dinilai layak justru tidak tercantum sebagai penerima. Kondisi ini menimbulkan persepsi ketidakadilan dan memicu ketidakpuasan di sebagian masyarakat. Temuan ini memperkuat penelitian Sari (2022) yang menyatakan bahwa persoalan utama dalam kebijakan bantuan sosial di tingkat desa sering kali terletak pada mekanisme pendataan yang belum transparan dan belum melibatkan partisipasi masyarakat secara penuh.

Aspek kepuasan masyarakat menunjukkan skor 4,05 yang termasuk kategori baik. Hal ini menandakan bahwa meskipun terdapat beberapa kendala teknis, masyarakat tetap menilai kebijakan BLT bermanfaat dan layak diteruskan. Rasa puas masyarakat umumnya muncul karena adanya dampak langsung terhadap pengurangan beban ekonomi. Dari wawancara lapangan, beberapa penerima menyampaikan bahwa dana BLT digunakan untuk kebutuhan pokok dan usaha kecil rumah tangga, sehingga secara tidak langsung membantu perputaran ekonomi lokal.

Dari sisi analisis kualitatif, ditemukan bahwa transparansi dan keadilan menjadi faktor kunci dalam pembentukan persepsi masyarakat. Ketika aparat desa melakukan pendataan terbuka dan melibatkan tokoh masyarakat, tingkat kepercayaan publik meningkat. Sebaliknya, ketika proses dianggap tertutup, muncul persepsi negatif dan rasa curiga terhadap kejujuran pelaksana program. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan publik tidak hanya diukur dari tercapainya target administratif, tetapi juga dari bagaimana masyarakat memaknai proses kebijakan itu sendiri.

Tabel 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat terhadap BLT

| <b>Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat</b> | <b>Pengaruh Terhadap Persepsi</b>   |
|---|-------------------------------------|
| Transparansi pendataan                              | Meningkatkan kepercayaan masyarakat |
| Partisipasi warga dalam musyawarah                  | Membentuk rasa adil dan diterima    |
| Keterlambatan penyaluran                            | Menurunkan tingkat kepuasan         |
| Keadilan pembagian bantuan                          | Mempengaruhi persepsi positif       |

Temuan ini juga memperkuat teori administrasi publik menurut Siagian (2015) yang menyebutkan bahwa efektivitas kebijakan publik sangat bergantung pada kualitas komunikasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah desa berperan bukan hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai mediator sosial yang memastikan kebijakan diterima dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

Hasil penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan studi oleh Lumban Gaol (2023) yang menemukan bahwa persepsi positif masyarakat terhadap kebijakan bantuan sosial meningkat ketika ada kejelasan informasi dan konsistensi waktu penyaluran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor komunikasi publik dan transparansi menjadi indikator utama keberhasilan pelaksanaan kebijakan bantuan sosial di tingkat lokal.

Novelty atau kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis di Desa Amplas, yang merupakan wilayah penyangga Kota Medan dengan karakteristik sosial yang majemuk. Dalam konteks ini, masyarakat memiliki tingkat heterogenitas ekonomi dan sosial yang tinggi, sehingga pelaksanaan kebijakan sosial seperti BLT memunculkan dinamika persepsi yang lebih kompleks dibandingkan desa homogen. Temuan ini memberikan gambaran baru bahwa persepsi publik terhadap kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh hasil kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh konteks sosial tempat kebijakan dijalankan.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik menjadi variabel penghubung antara kebijakan dan persepsi masyarakat. Ketika masyarakat merasa dilibatkan dan mendapatkan informasi yang jelas, persepsi mereka terhadap kebijakan akan cenderung positif, meskipun nominal bantuan relatif kecil. Sebaliknya, ketika muncul persepsi ketidakadilan atau informasi yang tidak transparan, kepercayaan publik menurun dan berdampak pada penilaian negatif terhadap kebijakan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk menempatkan aspek komunikasi publik sebagai bagian dari mekanisme kebijakan, bukan sekadar pelengkap administratif.

Hasil dan pembahasan ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan BLT tidak hanya diukur dari ketepatan waktu penyaluran dan jumlah bantuan, tetapi juga dari kualitas tata kelola kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan partisipasi publik. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu memperkuat sistem pendataan berbasis digital, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam musyawarah penerima manfaat, serta memastikan adanya mekanisme evaluasi rutin agar kebijakan serupa di masa depan lebih tepat sasaran dan diterima masyarakat secara luas.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Amplas, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dapat disimpulkan bahwa secara umum masyarakat menilai kebijakan ini sudah berjalan cukup baik dan memberikan dampak positif terhadap kehidupan sosial ekonomi warga. Program BLT dianggap berhasil meringankan beban kebutuhan dasar rumah tangga serta menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Dari hasil pengumpulan data, terlihat bahwa mayoritas warga menganggap bantuan ini efektif membantu kebutuhan pokok sehari-hari, terutama pada masa sulit pasca pandemi dan kondisi harga bahan pangan yang meningkat.

Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi beberapa hambatan. Masalah utama yang ditemukan yaitu ketidaktepatan sasaran penerima dan keterlambatan dalam proses penyaluran bantuan. Sebagian masyarakat merasa sistem pendataan masih belum sepenuhnya objektif, karena terdapat penerima yang dinilai tidak memenuhi kriteria, sementara warga yang layak justru belum mendapatkan bantuan. Kondisi ini menimbulkan perbedaan persepsi di tengah masyarakat, yang berdampak pada tingkat kepercayaan terhadap aparat desa sebagai pelaksana kebijakan.

Temuan lain menunjukkan bahwa transparansi, keadilan, dan komunikasi publik menjadi faktor yang sangat memengaruhi persepsi masyarakat. Ketika pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam proses musyawarah, membuka informasi penerima manfaat, dan menyampaikan kebijakan secara jelas, persepsi masyarakat cenderung positif. Sebaliknya, ketika proses dianggap tertutup, muncul rasa ketidakpuasan dan kecurigaan terhadap pelaksanaan kebijakan. Artinya, keberhasilan BLT tidak hanya diukur dari jumlah dana atau waktu penyaluran, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah desa mampu mengelola kebijakan secara adil, terbuka, dan partisipatif.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa persepsi publik merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas kebijakan sosial. Persepsi masyarakat mencerminkan sejauh mana kebijakan dapat diterima dan dijalankan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Karena itu, kebijakan bantuan sosial seperti BLT memerlukan mekanisme evaluasi berkelanjutan agar pelaksanaannya semakin tepat sasaran dan efisien.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan BLT di Desa Amplas telah memberikan dampak sosial dan ekonomi yang positif, meskipun masih memerlukan perbaikan dalam aspek pendataan dan transparansi pelaksanaan. Pemerintah desa diharapkan dapat

meningkatkan sistem informasi publik, memperkuat koordinasi antar perangkat desa, serta melibatkan masyarakat secara lebih luas dalam pengambilan keputusan terkait penerima manfaat. Dengan demikian, program bantuan dapat berjalan lebih efektif, adil, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah di tingkat desa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, S. (2019). *Langkah-Langkah Praktis dalam Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basri, H. (2021). Evaluasi Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai di Masa Krisis Ekonomi. *Jurnal Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*, 8(2), 101–113.
- Handayani, N., & Lubis, R. (2020). Persepsi Warga terhadap Penyaluran BLT dan Prinsip Keadilan Sosial di Pedesaan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Terapan*, 9(1), 54–67.
- Lumban Gaol, A. (2023). Keterbukaan dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Menyalurkan BLT: Studi Kasus di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 11(1), 22–33.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Analisis Data Kualitatif: Pendekatan Terapan untuk Penelitian Sosial (Edisi ke-3)*. California: SAGE Publications.
- Nasution, F., & Siregar, H. (2022). Kepuasan Masyarakat atas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Tingkat Desa. *Jurnal Pemerintahan dan Pembangunan Lokal*, 7(3), 145–158.
- Sari, D. (2022). Evaluasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Sosial dan Administrasi Publik*, 10(2), 189–200.
- Siagian, S. P. (2015). *Konsep Dasar Administrasi Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wulandari, R., & Putra, Y. (2021). Partisipasi Masyarakat dan Transparansi dalam Pelaksanaan BLT Dana Desa. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 6(4), 77–88.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan selama proses penelitian hingga penyusunan artikel ini selesai. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak Pemerintah Desa Amplas, Kecamatan Percut Sei Tuan, yang telah memberikan izin serta membantu peneliti dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan di lapangan.

Penulis tidak lupa berterima kasih kepada masyarakat Desa Amplas yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi sebagai responden dan memberikan pandangan jujur terkait pelaksanaan kebijakan Bantuan Langsung Tunai. Dukungan dan kerja sama seluruh pihak sangat membantu kelancaran proses penelitian ini.

Selain itu, penulis menyampaikan apresiasi kepada Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, khususnya Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, atas dukungan

akademik dan fasilitas penelitian yang diberikan. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik serta menjadi bahan pertimbangan dalam evaluasi kebijakan bantuan sosial di tingkat desa.

JURNAL JUDIKA